

PELAKSANAAN MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH WILAYAH D. I. YOGYAKARTA

Wartomo

Universitas Terbuka
wartomo @ ut.ac.id

Abstract

The study is aimed to investigate the implementation of inclusive education model in the region of Yogyakarta. Variables that are revealed in this study include: institutional, learning curriculum and evaluation, workforce, student affairs, infrastructure, and financing. Subjects were teachers, principals and inclusive education committee in the Yogyakarta region. The study population, applied in total population that all Inclusive Schools that are in the research area be a place of research, both public and private Inclusive Schools. This type of research evaluation, initiated the survey, conducted in May-October 2014. The data collection technique using questionnaires; interview; observation, documentation. The data analysis techniques used are integrated or synchronously between quantitative and qualitative descriptive approach. The results of the study visits of several indicators: (1) institutional conditions indicate, schools generally have a manager special fittings permit; (2) curriculum developed in the educational unit adjustment has been made to accommodate the needs of service children with special needs (ABK) in the setting of inclusive education; (3) conditions do not have the energy workforce mostly Teachers Special Advisor (GPK) in charge and appointed specifically as a teacher GPK inclusive schools. (4) the condition of the student; the admission of new students in the school inclusion of DIY presents special quota (special seats) behalf.

Conditions student in primary school inclusive of the Province of DIY are: enrollment ABK; (5) facilities and infrastructure; Data shows; special room inclusions 262; (6) financing; most schools have incorporated components of the financing for the implementation of inclusive education programs.

Keywords: *Implementation, inclusive, education.*

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan model pendidikan inklusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang diungkap dalam penelitian ini mencakup: kelembagaan, kurikulum pembelajaran dan evaluasi, ketenagaan, kesiswaan, sarana-prasarana, dan pembiayaan. Subyek penelitian adalah guru, kepala sekolah dan komite pendidikan inklusif di Wilayah DIY. Populasi penelitian, diterapkan secara total populasi yaitu semua Sekolah Inklusif yang berada di wilayah penelitian dijadikan tempat penelitian, baik Sekolah Inklusif negeri maupun swasta. Jenis penelitian evaluasi, diawali survey, dilaksanakan bulan Mei - Oktober 2014. Teknik pengumpulan data menggunakan angket; interview; observasi, dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik terpadu atau serentak antara pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dilihat dari beberapa indikator: (1) kondisi kelembagaan menunjukkan, sekolah umumnya mempunyai pengelola khusus kelengkapan surat ijin dalam program inklusif umumnya sudah berjalan dengan baik; (2) kurikulum yang disusun dalam satuan pendidikan telah dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam setting pendidikan inklusif; (3) kondisi ketenagaan kebanyakan belum mempunyai tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bertugas dan diangkat secara khusus sebagai guru GPK sekolah inklusif. (4) kondisi kesiswaan; dalam penerimaan siswa baru sekolah inklusi di wilayah Propinsi DIY menyediakan kuota khusus (kursi khusus) bagi ABK; (5) sarana dan prasarana; data menunjukkan;

ruang khusus inklusi; (6) pembiayaan; kebanyakan sekolah telah memasukkan komponen pembiayaan untuk implementasi program pendidikan inklusif.

Kata kunci: Pelaksanaan model pendidikan inklusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Terdapat beberapa indikator yang harus menjadi perhatian bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan di sekolah inklusif, yaitu indikator kelembagaan, kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Setiap indikator perlu dikembangkan sejumlah item yang dapat digunakan dalam satuan pendidikan untuk melakukan penilaian. Data hasil penilaian, sekolah dapat mengetahui posisinya (*level of performance*) sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Kenyataan yang ada di lapangan, dengan adanya Sekolah Inklusif yang saat sekarang banyak berdiri di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak kelemahan dan kekurangan, khususnya dalam pengelolaan manajemen; misalnya manajemen kelembagaan, kurikulum pembelajaran dan evaluasi, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, pembiayaan.

Khususnya dalam manajemen pengelolaan Sekolah Inklusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya pada sisi pengelolaan kelembagaan sekolah belum mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, atau menengah, atau jangka pendek. Sekolah belum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (seperti guru, karyawan, komite sekolah, orangtua siswa, tenaga ahli) dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah tidak melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Manajemen ketenagaan yang ada di Sekolah Inklusif wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; kebanyakan sekolah belum mempunyai tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang

bertugas dan diangkat secara khusus sebagai guru GPK sekolah inklusi. Sekolah tidak memiliki Guru Bantu untuk mendampingi ABK dalam mengikuti pembelajaran. Sekolah inklusif umumnya belum menyediakan tenaga profesional non guru untuk membantu ABK yang mengalami hambatan dalam belajar (misalnya dokter, psikolog, terapist, dll.).

Informasi yang diperoleh dari guru dan karyawan sekolah inklusif; ketika sekolah menerima murid baru; sekolah tidak pernah melakukan proses identifikasi dan asesmen untuk semua siswa yang diterima dalam setiap penerimaan peserta didik baru. Karena sekolah tidak memiliki alat/instrumen khusus yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan asesmen. Pada kepentingan lain sekolah tidak pernah melakukan rapat pembahasan (konferensi kasus) untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan asesmen.

Dana pembiayaan untuk mendukung operasional pendidikan inklusif, khususnya dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Pada umumnya sekolah belum memasukkan komponen pembiayaan untuk implementasi program pendidikan inklusi. Sekolah tidak pernah menerima subsidi khusus dari pihak Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk pengembangan pendidikan inklusi. Pada sisi lain sekolah secara khusus melakukan penghimpunan dana dari masyarakat/ donatur/dermawan/ lembaga sosial (lokal, nasional, internasional) untuk mendukung program pengembangan pendidikan inklusi, hal ini kalau dilakukan terus menerus akan menambah beban wali murid atau masyarakat.

Penelitian Haryanto (2011) menemukan adanya permasalahan krusial yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah inklusif, antara lain: (1) rekrutmen guru pembimbing khusus, sampai saat ini pemerintah belum mengangkat guru pembimbing khusus yang secara kompetensi memiliki keahlian untuk memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. (2) keberadaan sarana prasarana untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sering kali menjadi persoalan, sehingga aktivitas penyelenggaraan kegiatan anak-anak berkebutuhan khusus belum

dapat berjalan lancar; (3) monitoring dan evaluasi sekolah inklusif merupakan satu kesatuan, bukan dua hal yang dipisah-pisah, dimaksudkan sebagai proses mengidentifikasi indikator-indikator penyelenggaraan sekolah inklusi untuk mengetahui apa yang sudah ada, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum ada, dan apa yang belum dilakukan dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif di sekolah dasar.

Berbagai permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, ketika mereka belajar di sekolah inklusif, sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian Haryanto, (2011) memberikan gambaran bahwa dalam memasuki usia sekolah kasus yang sangat menonjol bagi anak berkebutuhan khusus di pedesaan adalah masalah pendidikan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi, transportasi dan komunikasi. Temuan hasil penelitian tersebut mendorong perlunya alternatif model pendidikan yang efektif untuk membantu memecahkan permasalahan anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu alternatif perlu dilaksanakan dengan lembaga terkait dan didukung sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus.

Temuan tersebut membuktikan perlunya pelayanan model pendidikan di sekolah inklusif terdekat bagi anak berkebutuhan khusus yang menyebar di pedesaan. Model pengembangan pendidikan di sekolah inklusif merupakan salah satu alternatif yang perlu diujicobakan.

Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah adalah: (1) mengetahui pelaksanaan model manajemen pendidikan di sekolah inklusif wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilihat dari pelaksanaan, dan evaluasi meliputi kelembagaan, kurikulum, pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, pembiayaan, (2) mencermati rancangan atau desain model evaluasi manajemen pendidikan di sekolah inklusif wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kelembagaan; kurikulum; pembelajaran; ketenagaan; kesiswaan; sarana dan prasarana; pembiayaan; (3) menguji

keberhasilan model manajemen pendidikan di sekolah inklusif meliputi: manajemen evaluasi diri, manajemen kelembagaan, kurikulum, pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, dan pembiayaan. (UNESCO, 2000)

1. Kajian Teori

Dalam hal analisis teori, mencermati dalam buku Pedoman Umum Pendidikan Inklusi (Depdiknas: 2009) komponen atau ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi yang di bahas dalam pengembangan model penelitian ini, variabel yang diungkap meliputi: (1) kelembagaan; (2) peserta didik; (3) kurikulum; pembelajaran; dan evaluasi; (4) ketenagaan; (5) peserta didik; (6) sarana dan prasarana; (7) pembiayaan.

Mencermati Pedoman Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2007); pentingnya monitoring dan evaluasi diri dilakukan adalah: (a) mengetahui kekuatan dan kekurangan dari satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif; (b) mengetahui posisi sekolah saat ini (*level of performance*) dibandingkan dengan posisi ideal yang diharapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.; (c) membantu satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu proses dan output pendidikan berbasis pendidikan inklusif; (d) membantu Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan dalam rangka pembinaan sekolah inklusif; (e) mendorong sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah inklusif; (f) sebagai bagian dari pembinaan sekolah yang berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan setempat.

Model yang ditawarkan dalam pelaksanaan evaluasi melalui penelitian ini adalah: (a) setiap akhir tahun ajaran, sekolah melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen evaluasi yang telah tersedia; (b) pengisian instrumen dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah dapat menugaskan kepada koordinator program inklusif (kalau tersedia); (c) kalau tidak

tersedia koordinator program inklusif, sekolah dapat menugaskan guru tertentu sebagai penanggung jawab isian instrumen evaluasi; (d) instrumen evaluasi harus diisi sesuai dengan fakta yang tersedia di sekolah dan diusahakan tidak ada item pertanyaan yang tidak diisi (kecuali memang fakta di lapangan tidak tersedia); (e) instrumen yang telah diisi, kemudian dilakukan skoring dengan menggunakan panduan skoring yang telah ada.; (f) hasil skoring dibandingkan dengan skor ideal per indikator dan skor ideal total semua indikator.; (g) skor yang dicapai menggambarkan posisi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif (perbandingan antara skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang diharapkan); (h) berdasarkan hasil skoring tersebut, dibuat laporan tahunan kinerja sekolah inklusif; (i) indikator-indikator yang tampak masih jauh dari skor ideal, harus menjadi perhatian sekolah untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pada tahun berikutnya dapat diperbaiki untuk mencapai skor ideal yang diharapkan.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta perlu evaluasi. Model evaluasi adalah rancangan yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu priogram. Para ahli evaluasi telah berusaha merancang model evaluasi yang dapat digunakan oleh para evaluator. Kaufman & Thomas (2008) menyebutkan bahwa ada 8 model evaluasi secara umum. Kedelapan model evaluasi tersebut adalah: (1) scriven's formative-sumative model/model formatif-sumatif scriven, (2) CIPP model/model CIPP, (3) CSE UCLA model/model CSE-UCLA, (4) stake's countenance Model/model penampakan, (5) Tyler's goal attainment Model/model pencapaian tujuan Tyler, (6) Provu's discrepancy model/model kesenjangan provus, (7) Scriven's goal-free model/ model bebas tujuan Scriven, (8) Stake model responsif stake. Menurut Kaufman model-model dalam kegiatan evaluasi tampak bervariasi namun pada prinsipnya kesemuanya model tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu: berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pemilihan

suatu model evaluasi ini bergantung pada tujuan pernyataan yang dikembangkan peneliti.

Model evaluasi dalam penelitian ini adalah menggunakan model CIPP yang dikembangkan Stufflebeam. Diharapkan dengan menggunakan model evaluasi CIPP ini akan diperoleh informasi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan model manajemen pendidikan di sekolah inklusif wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan model pendidikan inklusif di sekolah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditawarkan, banyak ditemukan hasil penelitian yang dapat mendukung konsep model pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah, antara lain sebagai berikut.

Dalam hal konsep intensitas pelayanan kinerja organisasi dan manajemen model pendidikan inklusi, hasil penelitian Brownell (2006) menyebutkan ada empat kondisi pokok program pendidikan inklusi untuk sekolah siswa ABK antara lain instruksi, pengetahuan, keterampilan, dan basis dasar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini perlu mencermati kondisi anak berkebutuhan khusus dari tingkat pendidikan dan tingkat kelainannya. Untuk mencermati anak berkebutuhan khusus tersebut diperlukan adanya kerjasama atau membangun kinerja antar instansi atau tim ahli. Margaret Mc Laughlin, (2003) dapat menyelidiki tingkat intensitas praktik pendidikan khusus untuk membantu meningkatkan para siswa berkebutuhan khusus mencapai hasil pendidikan sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam hal intensitas pelayanan dan partisipasi masyarakat, seperti diungkapkan dalam penelitian Michael W. (2001), dapat ditempuh melalui metode survai. Orang tua para siswa berkebutuhan khusus sudah menunjukkan, karena intensitas pelayanan pendidikan kurang maksimal, mereka mempertimbangkan jika anak-anaknya meninggalkan sekolah, yakni (a) mereka

merasa tidak ada perkembangan dan kemajuan di dalam sekolah, (b) mereka tidak suka sekolah, (c) mereka bosan, (d) mereka kurang dihargai oleh masyarakat, dan (e) mereka mempunyai permasalahan tingkah laku.

Hasil penelitian Erling E. (2006) menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun sangat dibutuhkan intensitas pelayanan guru sesuai dengan profesi dan kompetensi untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi dari tahun ke tahun kebutuhan tersebut sangat terbatas. UNESCO, (2000) manajemen untuk meningkatkan kualitas dan intensitas layanan guru sesuai dengan kekhususan mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus, perlu adanya sertifikasi. Hal ini sesuai dengan tuntutan kompetensi dan dimensi mutu guru.

Berbagai permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, khususnya mereka yang belajar di sekolah dasar, sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian Haryanto, (2011) memberikan gambaran bahwa dalam memasuki usia sekolah, kasus yang sangat menonjol bagi anak berkebutuhan khusus di pedesaan adalah masalah pendidikan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah, mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi, transportasi dan komunikasi. Temuan hasil penelitian tersebut mendorong perlunya alternatif model pendidikan yang efektif untuk membantu memecahkan permasalahan anak berkebutuhan khusus yang tinggal di pedesaan terpencil. Mereka umumnya mengalami kesulitan dalam hal transportasi, hal ini mendorong model pendidikan inklusi di sekolah dasar yang dekat dengan tempat tinggal ABK merupakan salah satu alternatif perlu diujicobakan.

Usaha untuk mengungkap jumlah anak berkebutuhan khusus yang tinggal di pedesaan dan kondisi pendidikannya secara efektif, hasil penelitian Haryanto (2011) di Kabupaten Gunungkidul, kurang lebih 80 % anak berkebutuhan khusus usia sekolah, ternyata tidak sekolah. Di suatu kecamatan ditemukan sekitar 290 anak berkebutuhan khusus yang umumnya tinggal di rumah masing-

masing, atau ikut orangtua, dalam keadaan buta pendidikan, tidak dapat membaca dan menulis.

Temuan tersebut membuktikan perlunya pelayanan model pendidikan inklusi di sekolah dasar terdekat bagi anak berkebutuhan khusus yang menyebar di pedesaan melalui model pendidikan inklusi. Model pengembangan pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan salah satu alternatif yang perlu diujicobakan. Penelitian Etscheidt. (2006) menggambarkan bahwa pelayanan pendidikan yang inklusi untuk anak-anak muda yang mengalami kelainan perlu pendidikan khusus melalui pelatihan tindakan khusus secara individual, termasuk pelayanan efektif anak-anak kecil yang mengalami kelainan mereka, misalnya dalam belajar di sekolah inklusi.

Untuk mengungkap efektivitas model, Margaret Mc Laughlin, (2003) menyelidiki tingkat efektivitas praktik model manajemen pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Model ini membantu meningkatkan manajemen pelayanan para siswa berkebutuhan khusus mencapai hasil pendidikan inklusi yang lebih baik. Jenny Corbett, (1999) menyebutkan pendidikan inklusi untuk kasus anak berkebutuhan khusus mempengaruhi seluruh Negara Eropa untuk menciptakan berbagai efektivitas pelayanan pendidikan. Jon Reyhner (1992) menyatakan bahwa para siswa tidak dapat berasimilasi ke dalam Euro-American, karena pengaruh kultur yang dominan untuk mencapai keberhasilan di sekolah.

Ekodjatmiko Sukarsa, (2007) berbagai model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut masih terdapat kendala atau kelemahan. Kenyataan yang ada tidak semua SLB konvensional yang menampung anak berkebutuhan khusus mampu untuk menyediakan asrama, akibatnya anak berkebutuhan khusus yang jauh dari sekolah, tinggal di pedesaan terpencil tidak dapat ditampung untuk bersekolah. Kelemahan model pendidikan di rumah sakit, terbatas untuk anak berkebutuhan khusus berat, misalnya kelainan mental yang tergolong idiot yang memiliki inteligensi rendah, mereka tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Karena keterbatasan sosial

ekonomi keluarga anak berkebutuhan khusus, model pendidikan yang ditampung di rumah sakit ini sangat sulit dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus yang tinggal di pedesaan.

2. Metode Penelitian

Pelaksanaan model pendidikan inklusif di Sekolah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan jenis pendekatan penelitian evaluasi. Mencermati pendapat Kaufman & Thomas (2008) model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah CIPP (Context, Input, Process, Product), yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Menggunakan model evaluasi CIPP ini diharapkan akan diperoleh informasi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan Model Pendidikan Inklusif di Sekolah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan bulan Mei - Oktober 2014.

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini meliputi: (1) kelembagaan, (2) kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi, (3) ketenagaan, (4) kesiswaan, (5) sarana dan prasarana, (6) pembiayaan. Lokasi dan subjek penelitian: (1) lokasi penelitian: Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) subyek penelitian: (a) guru kelas dan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif, (b) Kepala Sekolah inklusif, (c) komite sekolah, (d) pejabat dinas pendidikan dan Pengawas Sekolah. Instrumen Pengumpulan Data: (1) panduan interviu dan observasi, (2) seperangkat modul pelaksanaan model, (3) seperangkat alat tes dan angket.

Teknik analisis data; dikemukakan Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2004) karena penelitian ini bersifat penelitian evaluasi, oleh karena itu data yang terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan bantuan program SPSS, sedangkan data kualitatif dianalisis model interaktif.

B. Pembahasan

1. Model Pendidikan Inklusif

Model pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan/atau yang mengalami hambatan dalam akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya.

Model pendidikan inklusif menyediakan akses pembelajaran yang memungkinkan semua anak termasuk berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya di Sekolah inklusif. Sekolah menyediakan program pendidikan yang layak, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Sekolah tersebut menyediakan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar sesuai dengan potensinya.

Kata kunci dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah bahwa sekolah tersebut harus aksesibel terhadap semua peserta didik sesuai dengan hambatan yang dialami dan potensi serta kebutuhan pengembangannya yang beragam, baik dalam hal kebijakan manajemen, sarana dan prasarana, kurikulum dan pembelajaran, evaluasi maupun pembiayaan pendidikan. Adapun data kondisi sekolah inklusif di wilayah Propinsi DIY adalah sebagai berikut.

Indikator sekolah inklusif; Sesuai dengan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal satuan pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar ketenagaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar keuangan. Setiap indikator dari standar pendidikan tersebut, harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Bahkan satuan pendidikan dapat menetapkan standar pendidikan yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan.

Satuan pendidikan dengan standar nasional pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, menuntut adanya modifikasi terhadap indikator-indikator pendidikan agar pendidikan inklusif yang diselenggarakan dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Indikator tersebut dikembangkan khusus untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi diri penyelenggara pendidikan inklusif.

Dalam laporan penelitian ini ada sejumlah indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap satuan pendidikan dalam implementasi penyelenggara pendidikan inklusif, ada beberapa indikator: (1) kelembagaan, (2) kurikulum, pembelajaran dan evaluasi, (3) ketenagaan, (4) kesiswaan, (5) sarana prasarana, dan (6) pembiayaan.

Masing-masing indikator dikembangkan item dengan sejumlah kriteria untuk menggambarkan '*level of performance*' sebagai sekolah inklusif. Sekolah dapat melakukan evaluasi sendiri dan mengolah hasilnya untuk kemudian mengetahui posisinya sebagai sekolah inklusif, apakah sudah baik, sedang, kurang atau bahkan kurang sekali. Hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Data kondisi kelembagaan; data menunjukkan, sekolah umumnya mempunyai pengelola khusus kelengkapan surat ijin dengan disajikan dalam skor 289 (84%), pengelola program khusus 265 (75%), program inklusi 279 (79%), koordinasi pihak lain 266 (76%), keterlibatan tenaga ahli 264 (74%), laporan tertulis 252 (62%) dalam program inklusif umumnya sudah berjalan dengan baik. Pengelola program inklusif tergambar dalam struktur organisasi sekolah. Umumnya sekolah belum menyelenggarakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah belum mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, atau menengah, atau jangka pendek. Sekolah telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (seperti guru, karyawan, komite sekolah, orangtua siswa, tenaga ahli) dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif. Umumnya sekolah belum melakukan monitoring dan

evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif. Sekolah melibatkan SLB dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Data kondisi kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi; Kurikulum yang disusun dalam satuan pendidikan telah dilakukan penye-suaian untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan ABK dalam setting pendidikan inklusif tergambar sebagai berikut: Pelatihan kurikulum ABK 291 (82%) labi sesuai kebut ABK 270 (76%), Media pempebalajaran 268 (75%), program pengayaan 254 (76%), program kompensatoris 267 (73%), Laporan hasil belajar 272 (78%). Sekolah melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan modifikasi kurikulum bagi para guru di sekolah yang bersangkutan. Silabus yang dibuat telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK dalam setting pendidikan inklusif. Misalnya RPP yang dibuat oleh guru telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK dalam setting pendidikan inklusif.

Setiap ABK di sekolah inklusif telah dibuatkan program pendidikan individual sesuai dengan hasil asesmen. Sekolah melibatkan orangtua siswa ABK dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan dan/atau evaluasi pembelajaran ABK. Sekolah melibatkan tenaga ahli lain (seperti dokter, psikolog, guru SLB, guru BK, guru MP) dalam penyusunan program pendidikan individual. Umumnya sekolah belum memiliki administrasi pendidikan secara memadai khusus untuk ABK.

Pada sisi lain sekolah menyediakan layanan kompensatoris (misal Orientasi Mobilitas dan Tulisan Braille bagi Tunanetra, Bina Bahasa Isyarat bagi Tunarungu, Binadiri bagi Tunagrahita, Binagerak bagi Tunadaksa, Modifikasi Perilaku bagi Tunalaras dan Autis, dll) bagi ABK sesuai dengan kebutu-hannya. Sekolah telah menyediakan laporan hasil belajar khusus bagi siswa ABK di luar laporan hasil belajar yang sifatnya umum berlaku bagi semua siswa

Data kondisi ketenagaan; kebanyakan belum mempunyai tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) (bukan guru kunjung dari SLB) yang bertugas dan diangkat secara khusus sebagai guru

GPK sekolah inklusif. Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah menghadirkan Guru Kunjung dari SLB terdekat untuk membantu ABK dalam mempermudah mengikuti pembelajaran. Untuk memenuhi guru inklusi sering sekolah menyediakan dukungan pembiayaan secara khusus atas keberadaan Guru Pembimbing Khusus atau Guru Kunjung maupun Guru Bantu.

Kondisi ketenagaan sekolah dasar inklusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: tenaga GPK 264 (84 %), keberadaan tenaga ahli 253 (75 %), kompetensi guru ABK 252 (75 %), Pelatihan guru inklusi 258 (76 %), Pengalaman guru inklusi 253 (75 %), Beban tugas guru inklusi 261 (76 %).

Pembekalan (sosialisasi, pelatihan) tersebut diberikan oleh mereka yang berkompeten dan/atau profesional. Guru di sekolah inklusif umumnya belum faham dan terampil dalam mengelola program pendidikan inklusif. Guru-guru di sekolah inklusif umumnya merasa masih sangat membutuhkan tambahan pembekalan atau pelatihan pendidikan inklusif. Kebanyakan sekolah Dasar inklusif di wilayah Propinsi DIY belum memiliki guru berlatar belakang pendidikan psikologi dan/atau pendidikan luar biasa.

Data kondisi kesiswaan; dalam penerimaan siswa baru sekolah inklusi di wilayah Kabupaten Bantul menyediakan kuota khusus (kursi khusus) bagi ABK. Jumlah kuota/kursi khusus bagi ABK lebih dari satu anak untuk setiap rombongan belajar. Tapi sekolah belum melakukan proses identifikasi dan asesmen untuk semua siswa yang diterima dalam setiap penerimaan peserta didik baru. Karena sekolah tidak memiliki alat/instrumen khusus yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan asesmen. Kondisi kesiswaan di sekolah dasar inklusif wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: penerimaan siswa ABK 272 (83 %), identifikasi dan asesmen 254 (75 %), keterlibatan tenaga ahli 261 (77 %), data pribadi siswa 253 (75 %), karya-karya siswa ABK 262 (76 %), bimbingan siswa ABK 256 (75 %).

Ketika pelaksanaan penerimaan siswa baru, sekolah meminta informasi dan/atau pengisian data mengenai keadaan ABK kepada

orangtua ABK yang bersangkutan. Sekolah melakukan pencatatan/pengadministrasian secara tertib atas hasil dari identifikasi dan asesmen. Selanjutnya sekolah melakukan rapat pembahasan (konferensi kasus) untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan asesmen.

Data kondisi sarana dan prasarana; hasil penelitian menunjukkan; kebanyakan bangunan dan lingkungan fisik sekolah inklusif belum ditata dan disesuaikan dengan kondisi ABK sehingga aksesibilitas dan mobilitas ABK mengalami kesulitan. Kebanyakan sekolah belum memiliki sarana perpustakaan dan/atau laboratorium yang mudah diakses oleh ABK. Bangunan sekolah umumnya belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana khusus untuk ABK. Data menunjukkan; ruang khusus inklusi 262 (82 %), aksesibilitas siswa ABK 253 (75 %), sarana prasarana inklusi 242 (64 %), sarana transportasi ABK 252 (75 %), jaringan internet 258 (78 %), ruang multi-media 254 (76 %).

Sekolah belum mempunyai sarana/media pembelajaran khusus ABK sesuai dengan kebutuhan Anak Tunanetra, Tunarungu wicara, Tunagrahita, dan lain sebagainya. Tapi pada sisi lain sekolah telah memiliki jaringan internet yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk menunjang pembelajaran. Sekolah telah memiliki ruang multi media yang memungkinkan setiap peserta didik dapat belajar lebih optimal.

Data kondisi pembiayaan; dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), kebanyakan sekolah telah memasukkan komponen pembiayaan untuk implementasi program pendidikan inklusif. Misalnya komponen investasi (pendirian bangunan, pembelian alat,kendaraan dll). Termasuk komponen operasional (misal ATK, pelatihan, pendataan, rapat-rapat, bahan, dll). Komponen gaji dan/atau upah khusus (misal tunjangan guru GPK, honor khusus, transportasi, insentif dll).

Dalam hal pendanaan sekolah dasar inklusi di wilayah Prpinsi DIY menunjukkan: Imple-mentasi RAPBS 272 (82 %), sirkulasi dana sekolah 265 (77 %), sumber/subsidi dana 262 (75 %), dana

khusus wali murid 272 (82 %), operasional keuangan 266 (77 %), laporan keuangan 263 (76 %).

Kebanyakan sekolah menerima subsidi khusus dari pihak Pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) untuk pengembangan pendidikan inklusif. Pada sisi lain sekolah menerima sumbangan khusus dari pihak masyarakat/ swasta untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif, dan mendapat-kan dukungan pembiayaan secara khusus dari orangtua ABK.

2. Strategi Pelaksanaan Program Inklusif

Umumnya Sekolah Inklusif di wilayah Propinsi DIY telah memiliki Ijin atau surat keterangan lain sebagai landasan penyelenggara pendidikan inklusif dari: Dinas, Dikpora Propinsi DIY, Dinas Dikpora Kecamatan setempat, dan Kepala Sekolah/ Komite Sekolah.

Data menunjukkan, sekolah umumnya mempunyai pengelola khusus (Kordinator) program inklusif. Pengelola program inklusif (Kordinator) tergambar dalam struktur organisasi sekolah. Umumnya sekolah belum menyelenggarakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang penyeleng-garaan pendidikan inklusif. Sekolah belum mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, atau menengah, atau jangka pendek. Sekolah telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (seperti guru, karyawan, komite sekolah, orangtua siswa, tenaga ahli) dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif. Umumnya sekolah belum melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif. Sekolah melibatkan SLB dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Umumnya Sekolah telah melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah (misalnya Perguruan Tinggi, SLB, dokter, psikolog, organisasi kecacatan) untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah selalu membuat laporan tertulis (tahunan) mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif untuk disampaikan

kepada pemangku kepentingan, misalnya Dinas Dikpora Propinsi DIY

Kurikulum yang disusun dalam satuan pendidikan telah dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan ABK dalam setting pendidikan inklusif. Sekolah melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan modifikasi kurikulum bagi para guru di sekolah yang bersangkutan. Silabus yang dibuat telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK dalam setting pendidikan inklusif. Misalnya RPP yang dibuat oleh guru telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK dalam setting pendidikan inklusif.

Setiap ABK di sekolah inklusif telah dibuatkan program pendidikan individual sesuai dengan hasil asesmen. Sekolah melibatkan orangtua siswa ABK dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan dan/atau evaluasi pembelajaran ABK. Sekolah melibatkan tenaga ahli lain (seperti dokter, psikolog, guru SLB, guru BK, guru MP) dalam penyusunan program pendidikan individual. Umumnya sekolah belum memiliki administrasi pendidikan secara memadai khusus untuk ABK.

ABK telah mendapatkan tugas-tugas (misalnya PR) yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK dalam pelaksanaan pembelajaran. Kebanyakan guru belum menetapkan standar ketuntasan minimal bagi ABK. Ada sebagian guru melakukan modifikasi dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar bagi ABK. Guru menyediakan tambahan waktu khusus bagi ABK di luar jam pembelajaran yang terjadwal untuk memberikan remediasi. Guru menyediakan program pengayaan bagi ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pada sisi lain sekolah menyediakan layanan kompensatoris (misal Orientasi Mobilitas dan Tulisan Braille bagi Tunanetra, Bina Bahasa Isyarat bagi Tunarungu, Binadiri bagi Tunagrahita, Binagerak bagi Tunadaksa, Modifikasi Perilaku bagi Tunalaras dan Autis, dll) bagi ABK sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah telah menyediakan

laporan hasil belajar khusus bagi siswa ABK di luar laporan hasil belajar yang sifatnya umum berlaku bagi semua siswa.

Kebanyakan sekolahh inklusif belum mempunyai tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) (bukan guru kunjung dari SLB) yang bertugas dan diangkat secara khusus sebagai guru GPK sekolah inklusif. Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah menghadirkan Guru Kunjung dari SLB terdekat untuk membantu ABK dalam mempermudah mengikuti pembelajaran. Untuk memenuhi guru inklusi sering sekolah menyediakan dukungan pembiayaan secara khusus atas keberadaan Guru Pembimbing Khusus atau Guru Kunjung maupun Guru Bantu.

Dalam penerimaan siswa baru sekolah inklusi di wilayah Propinsi DIY menyediakan kuota khusus (kursi khusus) bagi ABK. Jumlah kuota/kursi khusus bagi ABK lebih dari satu anak untuk setiap rombongan belajar. Tapi sekolah belum melakukan proses identifikasi dan asesmen untuk semua siswa yang diterima dalam setiap penerimaan peserta didik baru. Karena sekolah tidak memiliki alat/instrumen khusus yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan asesmen.

Ketika pelaksanaan penerimaan siswa baru, sekolah meminta informasi dan/atau pengisian data mengenai keadaan ABK kepada orangtua ABK yang bersangkutan. Sekolah melakukan pencatatan/pengadministrasian secara tertib atas hasil dari identifikasi dan asesmen. Selanjutnya sekolah melakukan rapat pembahasan (konferensi kasus) untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan asesmen.

Untuk kepentingan seleksi siswa, sekolah menghadirkan pihak luar (seperti dokter, psikolog, ortopedagog, guru SLB, orangtua siswa ABK, dll) dalam konferensi kasus. Sekolah meminta bantuan tenaga psikolog untuk melakukan tes psikologi (seperti tes IQ, Kepribadian, Bakat dan minat, dll). Guru menggunakan data hasil identifikasi dan asesmen untuk keperluan pembelajaran dan/atau pembinaan bakat khusus ABK.

Hasil penelitian menunjukkan; kebanyakan bangunan dan lingkungan fisik sekolah inklusif belum ditata dan disesuaikan dengan kondisi ABK sehingga aksesibilitas dan mobilitas ABK mengalami kesulitan. Kebanyakan sekolah belum memiliki sarana perpustakaan dan/atau laboratorium yang mudah diakses oleh ABK. Bangunan sekolah umumnya belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana khusus untuk ABK. Sekolah belum mempunyai sarana/ media pembelajaran khusus ABK sesuai dengan kebutuhan Anak Tunanetra, Tunarungu wicara, Tunagrahita, dan lain sebagainya.

Dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), kebanyakan sekolah telah memasukkan komponen pembiayaan untuk implementasi program pendidikan inklusif. Misalnya komponen investasi (pendirian bangunan, pembelian alat, kendaraan dll). Termasuk komponen operasional (misal ATK, pelatihan, pendataan, rapat-rapat, bahan, dll). Komponen gaji dan/atau upah khusus (misal tunjangan guru GPK, honor khusus, transportasi, insentif dll).

Kebanyakan sekolah menerima subsidi khusus dari pihak Pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) untuk pengembangan pendidikan inklusif. Pada sisi lain sekolah menerima sumbangan khusus dari pihak masyarakat/ swasta untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif, dan mendapat-kan dukungan pembiayaan secara khusus dari orangtua ABK.

Untuk membantu keuangan, Komite Sekolah mengalokasikan dana khusus untuk implementasi program pendidikan inklusif. Sekolah secara khusus melakukan penghimpunan dana dari masyarakat/ donatur/ dermawan/ lembaga sosial (lokal, nasional, internasional) untuk mendukung program pengembangan pendidikan inklusif.

C. Kesimpulan

Sekolah inklusif umumnya mempunyai pengelola khusus, kelengkapan surat ijin dengan disajikan dalam skor 289 (84%), pengelola program khusus 265 (75%), program inklusi 279

(79%), koordinasi pihak lain 266 (76%), keterlibatan tenaga ahli 264 (74%), laporan tertulis 252 (62%) dalam program inklusif umumnya sudah berjalan dengan baik; Pengelola program inklusif tergambar dalam struktur organisasi sekolah. Umumnya sekolah belum menyelenggarakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah belum mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, atau menengah, atau jangka pendek.

Kurikulum yang disusun dalam satuan pendidikan telah dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan ABK dalam setting pendidikan inklusif tergambar sebagai berikut: Pelatihan kurikulum ABK 291 (82%) lebih sesuai kebut ABK 270 (76%), Media pembelajaran 268 (75%), program pengayaan 254 (76%), Program kompensatoris 267 (73%), Laporan hasil belajar 272 (78%). Sekolah melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan modifikasi kurikulum bagi para guru di sekolah yang bersangkutan. Silabus yang dibuat telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK dalam setting pendidikan inklusif. Misalnya RPP yang dibuat oleh guru telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK dalam setting pendidikan inklusif.

Sekolah Inklusif kebanyakan belum mempunyai tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) (bukan guru kunjung dari SLB) yang bertugas dan diangkat secara khusus sebagai guru GPK sekolah inklusif. Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah menghadirkan Guru Kunjung dari SLB terdekat untuk membantu ABK dalam mempermudah mengikuti pembelajaran. Untuk memenuhi guru inklusi sering sekolah menyediakan dukungan pembiayaan secara khusus atas keberadaan Guru Pembimbing Khusus atau Guru Kunjung maupun Guru Bantu.

Kondisi kesiswaan; dalam penerimaan siswa baru sekolah inklusi di wilayah Propinsi DIY menyediakan kuota khusus (kursi khusus) bagi ABK. Kondisi kesiswaan di sekolah dasar inklusif wilayah Propinsi DIY adalah: penerimaan siswa ABK 282 (83 %),

identifikasi dan asesmen 274 (75 %), keterlibatan tenaga ahli 271 (77 %), data pribadi siswa 263 (75 %), karya-karya siswa ABK 272 (76 %), bimbingan siswa ABK 266 (75 %).

Hasil penelitian menunjukkan; kebanyakan bangunan dan lingkungan fisik sekolah inklusif belum ditata dan disesuaikan dengan kondisi ABK sehingga aksesibilitas dan mobilitas ABK mengalami kesulitan. Kebanyakan sekolah belum memiliki sarana perpustakaan dan/atau laboratorium yang mudah diakses oleh ABK. Bangunan sekolah umumnya belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana khusus untuk ABK. Data menunjukkan; ruang khusus inklusi 262 (82 %), aksesibilitas siswa ABK 253 (75 %), sarana prasarana inklusi 242 (64 %), sarana transportasi ABK 252 (75 %), jaringan internet 258 (78 %), ruang multi-media 254 (76 %).

Dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), kebanyakan sekolah telah memasukkan komponen pembiayaan untuk implementasi program pendidikan inklusif. Misalnya komponen investasi (pendirian bangunan, pembelian alat, kendaraan dll). Termasuk komponen operasional (misal ATK, pelatihan, pendataan, rapat-rapat, bahan, dll). Komponen gaji dan/atau upah khusus (misal tunjangan guru GPK, honor khusus, transportasi, insentif dll). Pendanaan sekolah dasar inklusi di wilayah Propinsi DIY menunjukkan: Implementasi RAPBS 272 (82 %), sirkulasi dana sekolah 265 (77 %), sumber/subsidi dana 262 (75 %), dana khusus wali murid 272 (82 %), operasional keuangan 266 (77 %), laporan keuangan 263 (76 %). Kebanyakan sekolah menerima subsidi khusus dari pihak pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) untuk pengembangan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownell, Ross. Colon. 2006. *Obstacles to program effectiveness in secondary special education leah wasburn-moses, preventing school failure*. Washington: Spring 2006. Vol.50, Iss. 3; pg. 21, 10 pgs.
- Depdiknas. 2009. *Pedoman Pendataan Anak Berkelainan*, Jakarta: Departemen Depatemen Pendidikan Nasional.
- _____, 2009, *Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Inklusi*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007, *Pedoman Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Ekodjatmiko Sukarsa, 2007. *Pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif; Manajemen sekolah inklusif*; Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasiona
- Etscheidt. 2006. *Least restrictive and natural environments for young children with disabilities*, topics in early childhood special education. Austin: Fall 2006. Vol. 26, Iss.3.
- Erling E. 2006. *Long-term trends in the national demand, supply, and shortage of special education teachers*, The Journal of Special Education. Bensalem: Fall 2006. Vol. 40, Iss. 3 pg. 138, 13 pgs.
- Haryanto, (2011) *Evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di Sekolah Luar Biasa*, Laporan Penelitian, PLB FIP UNY.
- Jenny Corbett, 1999. *Vocational education and training to support the transition of young people with learning disabilities to paid*

- employment*, University of London, UK Finland 22 - 25 September 1999
- Jon Reyhner, 1992. *American indians out of school a review of school-based causes and solutions*, Journal of American Indian Education, Vol. 31 Nopember 3 January 1992
- Margaret McLaughlin, 2003. *Special education in the school community*, University of Maryland at College Park P.O. Box 1492 Washington, DC 20013 Volume 2, No. 2, 2003.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Michael W Harvey, 2001. *Vocational-technical education A logical approach to dropout prevention for secondary special education*, Preventing School Failure. Washington: Spring 2001. Vol.45, Iss. 3; pg. 108, 6 pgs
- Stake & Robert E. 2006. *The Countenance of Educational Evaluation*, Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation, Paper University of Illinois.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2004). *Evaluasi program pendidikan : pedoman teoritis praktis bagi praktisi pendidikan*. Jakarta.: Bumi Aksara
- Stufflebeam, Daniel L & Antohony J. Shinkfield. 1986. *Systematic Evaluation, A Self-Instructional Guide to Theory and practice*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- UNESCO, 2000. *Education For All: Meeting Our Collective Commitments, Text adopted by the World Education Forum*, Dakar, Senegal, 26-28 April 2000. [http:// www. unesco. org/ education/efa/ed_for all/dakfram eng.shtml](http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml).